

**KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG DALAM MENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PEMBANGUNAN
INFRASTUKTUR TRANSPORTASI DARAT DI KAMPUNG LUTAN**

Gregorius Jalung

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 12, Nomor 04, 2026**

KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT DI KAMPUNG LUTAN

Gregorius Jalung¹, Yahdi Qolbi²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran kepemimpinan kepala kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur transportasi darat di Kampung Lutan, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu yang menghadapi keterbatasan geografis dan aksesibilitas. Permasalahan utama penelitian ini adalah rendah dan tidak meratanya partisipasi masyarakat, terutama pada tahap perencanaan dan evaluasi pembangunan, yang disebabkan oleh lemahnya komunikasi pemerintah kampung, rendahnya kesadaran kolektif, serta tekanan aktivitas ekonomi masyarakat, kepemimpinan partisipatif sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perlunya penguatan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan partisipasi yang substantif dalam pembangunan infrastruktur Kampung.

Kata Kunci : *kepemimpinan kepala kampung, partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur, komunikasi pemerintahan*

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur transportasi darat khususnya jalan kampung memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap pelayanan publik.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: iglalalfh@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Dalam pelaksanaan pembangunan kampung, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran dan kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting dalam pembangunan karena masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi akan menciptakan pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa atau kampung untuk mengelola pembangunan secara mandiri berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kepala kampung memiliki peran sentral sebagai pemimpin yang bertanggung jawab menggerakkan masyarakat, mengelola sumber daya, serta membangun komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan pembangunan.

Kampung Lutan merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu yang menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur transportasi darat. Kondisi geografis yang berada di daerah pedalaman menyebabkan akses jalan masih terbatas dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah kampung maupun pemerintah daerah. Pembangunan jalan kampung menjadi prioritas utama karena berhubungan langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal, partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur transportasi darat di Kampung Lutan belum sepenuhnya optimal. Sebagian masyarakat masih kurang aktif dalam mengikuti musyawarah pembangunan maupun kegiatan pengawasan. Selain itu, kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari turut mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam pembangunan kampung.

Tentunya, kepemimpinan kepala kampung menjadi faktor penting yang dapat menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Kepala kampung dituntut mampu menjalankan fungsi sebagai motivator, fasilitator, komunikator, dan penggerak masyarakat dalam mendukung pembangunan. Melalui komunikasi yang efektif dan pendekatan partisipatif, kepala kampung dapat membangun kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap proses pembangunan.

Untuk itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan kepala kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur transportasi darat di Kampung Lutan Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan.

Kerangka Dasar Teori

Kepemimpinan Kepala Kampung

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Dalam konteks pemerintahan kampung, kepala kampung berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Rustandi (2018), kepemimpinan memiliki fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi. Kepala kampung yang mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif akan lebih mudah membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta menciptakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan kepala kampung tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak utama yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi pembangunan. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam suatu kegiatan, tetapi juga mencakup kontribusi pemikiran, tenaga, waktu, dan sumber daya lainnya untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Menurut Zahara (2018), partisipasi masyarakat dapat terwujud apabila terdapat komunikasi yang terbuka dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami serta terlibat dalam proses pembangunan. Sukarni (2018) menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memberikan gagasan dan masukan dalam pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kampung karena mencerminkan tingkat kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan

Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintahan merupakan proses penyampaian informasi, kebijakan, dan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat maupun antarinstansi pemerintahan. Menurut Putra dan Handoko (2021), komunikasi pemerintahan bertujuan menciptakan koordinasi, legitimasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Komunikasi pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat (Rahmawati et al., 2025). Selain itu, komunikasi pemerintahan yang efektif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Dipong et al., 2018). Dengan demikian, komunikasi pemerintahan memiliki peran strategis dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Hubungan Komunikasi Dan Partisipasi

Komunikasi dan partisipasi merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam proses pembangunan masyarakat. Komunikasi yang efektif dapat mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat karena masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pembangunan. Menurut Riswanti et al. (2021), komunikasi menjadi

instrumen utama yang menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan partisipasi merupakan bentuk nyata dari keberhasilan komunikasi yang dilakukan pemerintah. Wijaya (2013) juga menjelaskan bahwa komunikasi yang bersifat terbuka dan dua arah mampu menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, semakin baik kualitas komunikasi yang dilakukan pemerintah kampung, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan kampung.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh dalam bentuk kalimat atau narasi menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian menekankan deskripsi dan analisis untuk mengungkap proses dan makna. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk menyesuaikan fokus penelitian dengan realitas lapangan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kepemimpinan Kepala Kampung

Pada kepemimpinan Kepala Kampung Lutan dalam pembangunan infrastruktur transportasi darat telah menunjukkan peran yang cukup efektif dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Kepala kampung tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai penyelenggara pemerintahan kampung, tetapi juga berperan sebagai motivator, fasilitator, komunikator, dan penggerak masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan jalan kampung, kepala kampung secara aktif melakukan koordinasi dengan perangkat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tokoh masyarakat, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan yang diterapkan cenderung menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan melalui musyawarah kampung. Melalui pendekatan tersebut, kepala kampung mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga tercipta kepercayaan dan dukungan terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Namun demikian, efektivitas kepemimpinan masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait kondisi geografis kampung yang cukup sulit dijangkau dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah kampung dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

kepala kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan, terutama melalui pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah kampung dan kegiatan gotong royong. Pada tahap perencanaan pembangunan, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan yang dianggap prioritas melalui forum musyawarah kampung. Sementara pada tahap pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga, pemikiran, dan dukungan terhadap

pembangunan infrastruktur transportasi darat yang sedang dilaksanakan. Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan tergolong cukup tinggi karena masyarakat menyadari bahwa pembangunan jalan akan memberikan manfaat langsung terhadap aktivitas sehari-hari mereka. Akan tetapi, partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan dan evaluasi masih relatif rendah. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pengawasan pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah kampung dan BPK sehingga keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat telah mengalami peningkatan, namun keterlibatan masyarakat masih perlu diperkuat agar mencakup seluruh tahapan pembangunan secara menyeluruh.

Pembangunan Infrastruktur Transportasi darat

Pembangunan infrastruktur transportasi darat di Kampung Lutan merupakan salah satu program prioritas pemerintah kampung yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan jalan kampung telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam memperlancar transportasi, mempermudah distribusi hasil pertanian, meningkatkan akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah kampung telah berupaya melaksanakan pembangunan jalan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa ruas jalan yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas karena kondisi geografis wilayah yang cukup berat serta keterbatasan anggaran pembangunan yang dimiliki pemerintah kampung. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi darat di Kampung Lutan masih memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur transportasi darat sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala kampung dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan tersebut.

Strategi Komunikasi Pemerintahan Kampung

Komunikasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan proses komunikasi pesan dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami, menerima, dan berpartisipasi terhadap kebijakan yang dirumuskan. Dipong et al.(2018) komunikasi pemerintahan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari laporan realisasi kegiatan dan dokumentasi foto, terlihat musyawarah kampung sebagai forum komunikasi pemerintahan dan pengambilan keputusan kolektif. Forum menunjukkan praktik komunikasi dua arah yang transparan antara pemerintah kampung dan masyarakat. Pola ini mencerminkan kepemimpinan konsultatif yang memperkuat legitimasi kebijakan Pembangunan Kami biasanya menyampaikan rencana pembangunan kepada

masyarakat melalui musyawarah kampung dan pertemuan di tingkat RT, supaya masyarakat tahu program yang akan dijalankan.

Gambar Musyawarah Kampung Lutan



Gambar Tersebut Menunjukkan bahwa Pemerintah kampung telah memanfaatkan forum musyawarah dan pertemuan RT sebagai sarana komunikasi dua arah untuk menyampaikan rencana pembangunan dan menampung aspirasi masyarakat. Namun demikian, efektivitas strategi komunikasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidakmerataan penyampaian informasi kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi komunikasi pemerintahan kampung, baik melalui perluasan saluran komunikasi, peningkatan intensitas sosialisasi, maupun penguatan mekanisme umpan balik, agar fungsi komunikasi sebagai jembatan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan inklusif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kampung.

strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kampung Lutan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui komunikasi langsung dan komunikasi kelompok. Komunikasi langsung dilakukan oleh kepala kampung melalui kunjungan kepada masyarakat, pertemuan informal, dan koordinasi dengan tokoh masyarakat serta Ketua RT. Sementara itu, komunikasi kelompok dilakukan melalui forum Musyawarah Kampung (Muskam), rapat kampung, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang menjadi sarana penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Strategi komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan pentingnya pembangunan infrastruktur transportasi darat bagi kehidupan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran terkait pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi pembangunan masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Beberapa masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

kepemimpinan Kepala Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur transportasi darat di Kampung Lutan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Kampung memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur secara terencana dan berkelanjutan melalui penetapan skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran kampung, namun tingkat partisipasi masyarakat yang terbangun belum sepenuhnya optimal karena masih didominasi oleh keterlibatan pada tahap pelaksanaan fisik, sementara partisipasi dalam tahap perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan rendahnya keterlibatan aktif masyarakat terjadi karena tidak semua warga hadir atau berpartisipasi dalam forum perencanaan seperti musyawarah kampung, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi, kesibukan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari (seperti bekerja), serta minimnya sosialisasi dari pemerintah kampung. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia terlihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat maupun aparatur kampung dalam menyusun usulan yang sistematis, melakukan pengawasan, serta memahami proses pembangunan secara teknis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Kepemimpinan Kepala Kampung dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pembangunan Insfasuktur Transpotasi Darat di Kampung lutan sebagai berikut:

1. Disarankan agar Pemerintah Kampung Lutan perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, terutama pada tahap pengawasan dan evaluasi. Selama ini partisipasi masyarakat lebih dominan pada tahap pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengawasan dan evaluasi juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Disarankan agar Kepala kampung perlu terus mempertahankan dan meningkatkan pola kepemimpinan yang partisipatif dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi bersama masyarakat. Melalui komunikasi yang lebih intensif dan terbuka, masyarakat akan lebih mudah memahami tujuan pembangunan serta terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kampung.
3. Disarankan agar Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam pembangunan kampung, tidak hanya pada tahap pelaksanaan tetapi juga pada tahap perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Keterlibatan masyarakat secara aktif akan membantu pemerintah kampung dalam menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Disarankan agar Ketua BPK Kampung Lutan diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi darat yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung. Selain menjalankan fungsi pengawasan, BPK juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kampung dan masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Dengan optimalnya peran BPK, transparansi dan akuntabilitas pembangunan dapat lebih terjamin sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung Lutan.
5. Bagi dunia akademik Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan pemerintahan kampung, partisipasi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan lokasi, objek, maupun pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian di bidang pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afrizal, D., Saputra, R., Wahyuni, L., & Erinaldi. (2019). Fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif dan delegasi dalam melihat fungsi kepemimpinan kepala desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(1), 1–10.
- Dipong, S., Dengo, S., & Kairupan, J. (2018). Komunikasi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58), 1–9.
- Putra, A., & Handoko, T. (2021). Komunikasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah: Kasus dinamika pelaksanaan local lockdown dalam mencegah penyebaran COVID-19. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 2(1), 1–15.
- Rahmawati, N., Suryadi, A., & Pratama, D. (2025). Komunikasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45–58.
- Riswanti, D., Hidayat, T., & Nurjanah, S. (2021). Peran komunikasi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 120–131.
- Rustandi. (2018). *Kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan desa*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarni. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 88–97.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).

Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Wijaya, A. (2013). Komunikasi pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 11(2), 45–56.

Zahara, E. (2018). Peranan komunikasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan. *Warta Dharmawangsa*, 55, 1–12.